

**KONFLIK KEPENTINGAN APLIKASI POLA KEMITRAAN PADA  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
Studi Di PT. Daya Landak Plantation Desa Mandor Kiru  
Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak**

**UUN SUWITO  
NIM. E51110001**

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Tanjungpura Pontianak, 2015. E-mail: uun.suwito@yahoo.com

**ABSTRAK**

Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang sangat baik untuk mengembangkan berbagai usaha, terutama dibidang perkebunan. Dengan wilayah daratan yang luas, sebagian besar masih merupakan hutan yang belum dioleh serta memiliki banyak sungai untuk keperluan pengairan. Masyarakat juga memiliki sifat yang terbuka terhadap orang luar namun berada pada tingkat perekonomian yang rendah. Bertujuan untuk membangun perekonomian masyarakat, maka dibangunlah perusahaan di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya perusahaan maka timbul juga permasalahan-permasalahan sosial serta konflik antara masyarakat dengan perusahaan itu sendiri. Kepentingan antara perusahaan dan masyarakat berbeda. Penulisan Skripsi ini bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Peneliti melakukan studi pustaka serta observasi ke lapangan dan melakukan wawancara dengan beberapa orang yang memiliki keterkaitan antara masyarakat dan perusahaan guna memperoleh data. Data yang diperoleh dari usaha yang dilakukan, kemudian dikaji dengan teori sosial. Teori yang digunakan adalah teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Mark dan Ralp Dahrendrof.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya Konflik antara Perusahaan dan Masyarakat yang ada di Desa Mandor Kiru terjadi karena adanya ketidakpuasan Masyarakat dengan sistem yang dipegang oleh perusahaan mengenai hal pengaturan sistem kerja dan hasil yang didapatkan oleh Masyarakat. Karena merasa tidak puas, maka masyarakat melakukan tindakan seperti panen sawit yang dilakukan secara sepihak, melakukan pemagaran lahan serta hal lain yang dapat merugikan perusahaan dan masyarakat itu sendiri. Dengan penelitian ini, diharapkan perusahaan dapat memperhatikan masyarakat dan menangani setiap permasalahan yang terjadi dengan cara yang bijaksana. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran untuk terus memperbaiki Sumber Daya Manusia(SDM) yang ada. Bagi pemerintah sebagai fasilitator pembangunan harus memperhatikan kepentingan (hak) masyarakat serta meningkatkan pengawasan dan pengawalan, mempertegas peraturan dan hukum yang perizinan sehingga perusahaan tidak lamban dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Untuk hal ini, perlu disiapkan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Kata-kata Kunci: Konflik Kepentingan, Pola Kemitraan, Masyarakat

## PENDAHULUAN

Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang sangat baik untuk mengembangkan berbagai usaha, terutama dibidang perkebunan. Dengan wilayah daratan yang luas, sebagian besar masih merupakan hutan yang belum dioleh serta memiliki banyak sungai untuk keperluan pengairan. Selain memiliki potensi alam yang baik, masyarakat yang ada di kalimantan Barat juga mempunyai sifat Ynag terbuka bagi orang luar yang masuk wilayah mereka. Memiliki berbagai keindahan menjadikan pulau Kalimantan Barat sebagai sasaran dan juga tujuan oleh pemodal asing tertarik untuk menanamkan modal yang dimiliki.

Banyak jenis perkebunan yang sudah dibudidayakan dan memanfaatkan lahan yang subur, seperti perkebunan yang bergerak dibidang tanaman karet, kelapa hybrida dan yang sangat masif sekarang ini adalah perkebunan yang bergerak dibidang kelapa sawit serta perkebunan lainnya yang menggunakan dan memanfaatkan kesuburan tanah kalimantan. Perkebunan, tersebar pada setiap masing-masing wilayah yang ada di Kalimantan Barat. Setiap wilayah memiliki areal-areal perkebunan yang berbeda-beda. Pembangunan perkebunan dalam sekala besar, membutuhkan lahan yang besar pula Seperti perkebunan dengan komoditi unggulannya kelapa

sawit. Karena dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit memang sangat memungkinkan dalam hamparan lahan yang cukup luas agar menghasilkan keuntungan yang besar pula.

Kecamatan Jelimpo berdirinya satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Pembangunan perkebunan membutuhkan hamparan lahan yang sangat lusa agar komoditi tersebut dapat dikembangkan dengan baik. Hamparan lahan yang luas didapatkan perusahaan tentu dengan menjalin kerja sama antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Sebelum terbentuknya kerja sama, antara masyarakat dengan perusahaan menjalin perjanjian supaya apa yang diharapkan antara masyarkat dan perusahaan dengan adanya pembangunan ini dapat terwujud dengan baik. Bentuk perjanjian yang biasa dilakukan adalah pola kemitraan. Perusahaan bermitra dengan masyarakat dalam mengelola perkebunan tersebut.

Pembangunan bertujuan untuk untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik secara individual maupun secara kelompok dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan alam (Trijono, 2007).

Menurut Soemarwoto(1989), pembangunan selalu membawa perubahan dan sudah barang tentu perubahan yang diharapkan itu

adalah perubahan yang baik menurut ukuran manusia. Menurut Garna (2004), pembangunan adalah suatu entitas yang merangkum semua unsur aktifitas kehidupan manusia, (Arkanudin, 2011). Adanya pembangunan yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat, pasti akan adanya suatu perubahan sosial. Perubahan kearah yang lebih baik meupun perubahan kearah yang kurang baik.

Perubahan sosial merupakan adanya pegeseran dari hal yang biasa dilakukan atau hal yang biasa terjadi dalam suatu masyarakat kearah hal yang belum biasa atau bahkan tidak pernah terjadi namun baru terjadi.

Segala bentuk perubahan terjadi dalam suatu masyarakat yang terlibat dalam lingkaran pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan perusahaan. Pembangunan melibatkan berbagai elemen yang ada di dalam suatu masyarakat, dan yang menjadi sasaran pembangunan adalah lingkungan masyarakat yang dianggap ketinggalan dan miskin. Kemiskinan yang selalu menjadi alasan suatu pembangunan dalam bentuk fisik. Kemiskinan adalah keadaan yang tidak mampu memelihara taraf kehidupan kelompok atau tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental dan fisik dalam kehidupan masyarakat (Juhana, 2004). Masyarakat merupakan penyeimbang dari keadaan yang terjadi dalam semua

yang ada di dalamnya. Masyarakat dianggap selalu untuk di berdayakan karena keadaan masyarakat itu yang miskin. Ini yang menjadi alasan bagi pemerintah untuk memperhatikan keadaan masyarakat dengan jalan bekerja sama dengan perusahaan.

Tujuan dari pembangunan supaya adanya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Untuk hal itu, pemerintah menjalin kerja sama dengan perusahaan dalam menunaikan amanah kesejahteraan tersebut. Dalam pembangunan yang dilakukan melibatkan pemerintah yang menjadi fasilitator pembangunan, perusahaan sebagai investor dan pemegang modal serta masyarakat yang menjadi tujuan atau sasaran pembangunan. Dari ketiga elemen yang ada, masing-masing memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda dalam pembangunan yang dilakukan. Dengan adanya kepentingan yang berbeda tersebut, munculah gesekan-gesekan serta intrik-intrik dalam suatu pembangunan. Seperti yang terjadi pada banyak pembangunan, dalam hal ini pembangunan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pada sejumlah perkebunan, sering terjadi konflik yang melibatkan perusahaan, masyarakat maupun pemerintah sendiri. Dalam hal ini, masyarakat yang selalu menjadi sasaran dari setiap kepentingan yang dimiliki oleh setiap unsur dalam pembangunan. Kepentingan-kepentingan itu yang

menjadi tujuan. Untuk tujuan kepentingan tersebut, ada yang menjadi korban yaitu masyarakat. Karena masyarakat tidak memiliki kekuatan serta kekuasaan, masyarakat adalah orang-orang kecil yang membutuhkan perlindungan. Namun jika perlindungan tidak lagi dimiliki, maka masyarakat yang merasa terdesak akan melawan. Perlawanan yang terjadi merupakan bentuk protes yang mengakibatkan konflik. Seperti Data yang dilansir oleh Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI KALBAR, ada banyak kasus yang terjadi. Pada tahun 2008-2010 tercatat ada 280 kasus konflik perkebunan kelapa sawit antara Perusahaan dengan Masyarakat. Dari 280 kasus, ada 20 kasus diantaranya yang masuk ranah kriminalitas. Pada tahun 2011, terjadi 88 kasus yang tercatat

Konflik serupa terjadi pula pada salah satu perusahaan PT. Daya Landak Plantation yang ada di Kecamatan Jelimpo. Antara Perusahaan dan Masyarakat adanya perbedaan kepentingan serta pendapat yang mengakibatkan konflik pada perusahaan atau perkebunan.

Fenomena yang terjadi seperti ini yang menarik bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan

## Tinjauan Literatur

### 1. Konflik

Para teoritis konflik memandang konflik dan perbedaan kepentingan sebagai determinan utama untuk pengorganisasian kehidupan sosial. Dengan kata lain, struktur masyarakat sangat ditentukan oleh upaya-upaya yang dilakukan berbagai individu dan kelompok untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas yang akan memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan mereka, karena sumber daya ini dalam keadaan tertentu selalu terbatas maka konflik untuk mendapatkannya selalu terjadi.

Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan lenyap dari sejarah. Selama kita masih hidup tidak akan mungkin kita menghapus konflik dari dunia ini. Berbagai macam dari perbedaan selera, perbedaan pendapat, dapat menyebabkan timbulnya konflik. Masalahnya adalah apabila konflik tersebut kemudian terus berlanjut hingga melahirkan kekerasan.

Harjana, perbedaan pendapat dan pandangan diantara kelompok-kelompok masyarakat yang akan mencapai nilai yang sama, perselisihan pertentangan antara dua orang atau dua kelompok dimana perbuatan yang satu berlawanan dengan yang lain sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu.

Alisjahbana, S. T.,  
mengartikan konflik adalah

perbedaan pendapat dan pandangan diantara kelompok-kelompok masyarakat yang akan mencapai nilai yang sama.

Stoner J. A. F. Dan Freeman, R. E., berpendapat bahwa konflik adalah mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi atau kepribadian. Perbedaan pendapat dan persepsi mengenai tujuan, kepentingan maupun status serta nilai individu dalam organisasi merupakan penyebab munculnya konflik.

Dari pendapat para ahli di atas mengatakan bahwa konflik antar dua orang atau dua kelompok mengenai suatu nilai terjadi karena adanya kesalahpahaman serta berbedanya cara pandang mengenai suatu tujuan yang akan dicapai. Masing-masing orang atau kelompok memiliki cara tersendiri dalam mencapai suatu tujuan dimana cara yang dipertahankan tidak dimengerti oleh kelompok atau orang lain.

## 2. Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu kekuatan impersonal yang mempengaruhi, mengekang dan juga menentukan tingkah laku anggota-anggotanya. Masyarakat bukan sekedar penjumlahan suatu individu semata-mata, melainkan suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antar mereka, sehingga menampilkan realita tertentu yang mempunyai ciri-cirinya sendiri (Berry, 2003).

Masyarakat adalah gabungan dari beberapa individu yang secara berkelompok mendiami suatu wilayah tertentu yang memiliki ikatan emosional serta saling mempengaruhi satu sama lain dan memiliki ciri tersendiri.

## 3. Perusahaan Sawit

Perusahaan adalah suatu organisasi dimana sumber daya *input* dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa (output) kepada pelanggan. Hampir di semua perusahaan mempunyai tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan laba. Jenis perusahaan dibedakan menjadi tiga, yaitu: perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Sedangkan bentuk dari perusahaan itu sendiri dibedakan menjadi: perusahaan perseorangan dan persekutuan (perseroan).

Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditi perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal.

Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung ukuran volume komoditi yang dipasarkannya. Namun demikian, suatu perkebunan memerlukan suatu luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkannya. Selain itu,

perkebunan selalu menerapkan cara monokultur, paling tidak untuk setiap blok yang ada di dalamnya. Penciri lainnya, walaupun tidak selalu demikian, adalah terdapat instalasi pengolahan atau pengemasan terhadap komoditi yang dipanen di lahan perkebunan itu, sebelum produknya dikirim ke pembeli.

[http://carapedia.com/pengertian\\_d\\_efinisi\\_perusahaan\\_info2035.html](http://carapedia.com/pengertian_d_efinisi_perusahaan_info2035.html)

#### 4. kemitraan

Dalam rangka menciptakan *good governance* di suatu negara hendaknya mampu mendekatkan antara unsur pemerintah, unsur swasta maupun masyarakat. Pemerintah hendaknya menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada swasta dan masyarakat, sehingga keduanya dapat mengambil porsi yang tepat dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tak berdaya (masyarakat miskin), supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun.

## Pembahasan

### Deskripsi

#### 1. Proses Penyerahan Lahan Dari Masyarakat Kepada Perusahaan.

Pihak perusahaan tidak mengalami banyak kendala dalam hal pembebasan lahan yang akan digunakan untuk keperluan membangun perkebunan kelapa sawit yang menggunakan hamparan lahan yang cukup luas. hamparan lahan yang luas diperoleh dari tanah atau lahan milik masyarakat yang sudah secara turun temurun mendiami lahan mereka. Awalnya, pihak investor datang di lingkungan masyarakat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkenaan dengan pembangunan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sebelum turun ke masyarakat secara umum, perusahaan menggunakan pendekatan secara persuasif dengancara mendekati orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat secara keseluruhan. Pihak-pihak yang terlebih dahulu didekati oleh perusahaan adalah pemerintah daerah guna mendapatkan ijin usaha, kemudian pemerintah desa yaitu kepala desa. Setelah memperoleh persetujuan dari pihak-pihak yang pertama yang ditemui, barulah kemudian perusahaan turun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi dengan difasilitasi oleh pemerintahan desa yang ada di desa tersebut. Pihak perusahaan dengan didampingi oleh pemerintah dalam melakukan sosialisasi ini. Dalam sosialisasi tersebut disebutkan bahwa akan dibangunnya satu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan.

Dalam hal ini perusahaan DLP akan bermitra dengan masyarakat. Bermitra yang dimaksudkan disini adalah pola pembagian yang dilakukan oleh perusahaan dengan masyarakat. Pembagian yang ditawarkan oleh pihak perusahaan pertama adalah 85 : 15. Artinya dari jumlah lahan yang diserahkan, 85 % menjadi hak perusahaan, sedangkan 15 % menjadi hak masyarakat. Namun dengan pembagian yang seperti itu, banyak masyarakat yang menolak. Dengan penolakan tersebut, perusahaan melakukan penawaran kembali dengan pihak masyarakat dalam pertemuan berikutnya. Penawaran yang diajukan oleh perusahaan ialah dengan menerapkan sistem pembagian 80 : 20. Dikatakan bahwa masyarakat berhak menerima hasil dari lahan yang mereka serahkan kepada pihak perusahaan sebesar 20 % dari hasil lahan yang diserahkan kepada pihak perusahaan dengan tidak bekerja. Jika masyarakat bekerja, maka upah kerja mereka akan mereka terima lagi. Dengan hal ini masyarakat merasa bahwa pembangunan perkebunan yang ada di lingkungan mereka ini berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu banyak dari mereka yang setuju dengan pembangunan perkebunan. Untuk menguatkan pernyataan setujuannya masyarakat atas pembangunan perusahaan sawit yang ada di lingkungan mereka, masyarakat dimintai bertandatangan

pada lembaran yang sudah disediakan untuk kemudian dilanjutkan dengan data sebagai orang yang bersedia menyerahkan lahannya. Dari sebgaiian besar masyarakat yang setuju, namun masih ada dari masyarakat yang tidak mau untuk menyerahkan lahan mereka untuk digarap perusahaan membuka perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan lahan yang besar. Bagi masyarakat yang tidak menyerahkan lahan, tidak ada paksaan yang dilakukan. Lahan yang mereka miliki juga tidak digarap oleh perusahaan, lahan yang tidak diserahkan kepada perusahaan masuk kedalam lahan *ingklap*. Namun tidak menutup kemungkinan jika orang yang mempunyai hak akan lahan *ingklap* ini jika suatu saat ingin lahan akan diserahkan, pihak perusahaan akan menerima dan menggarap lahan tersebut.

Setelah menyatakan setuju, proses penyerahan lahanpun dilakukan. Sebelum dilakukan pengurusan lahan, terlebih dahulu dilakukan proses pengukuran jumlah lahan yang diserahkan oleh masyarakat. Dilakukannya survei lahan, ternyata ada beberapa kriteria lahan yang diserahkan oleh masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang menyerahkan lahan kosong yang letaknya memang jauh dari lokasi tempat pemukiman masyarakat, tetapi ada juga yang menyerahkan lahan yang sudah mempunyai tumbuhan di atasnya

seperti kebun karet, jenis-jenis buah dan tumbuhan lain.

Dengan lahan yang berbeda ini, ada yang merasa dirugikan karena lahan yang masyarakat miliki sudah ditumbuhi oleh tanaman yang menghasilkan, maka diadakannya kesepakatan antara pihak masyarakat dengan perusahaan. Kesepakatan ini dibuat di atas kertas berupa sebuah dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh aparat pemerintah. Dengan adanya kesepakatan ini, baik pihak perusahaan maupun pihak masyarakat tidak merasa dirugikan atau merugikan. Kesepakatan dibuat atas keputusan hasil musyawarah untuk mencapai suatu mufakat yang akan dipatuhi oleh yang membuat kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah mengenai Ganti Rugi Tanam Tumbuhan (GRTT), yakni dengan biaya atau harga yang layak dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu perusahaan dan masyarakat serta diketahui oleh pihak pemerintahan kabupaten Landak.

Setelah proses GRTT terselesaikan, sejumlah alat berat datang untuk mengusur lahan milik masyarakat yang telah di serahkan kepada perusahaan untuk digusur dan dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit PT. Daya Landak Plantation (PT. DLP).

## **2. Pola Kemitraan Yang Dibangun Perusahaan Dengan Masyarakat.**

Pola kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama pembangunan dan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma melalui lembaga koperasi dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, saling mengisi, utuh dan berkesinambungan.

Pola kemitraan yang dibangun oleh Perusahaan PT. Daya Landak Plantation adalah membentuk perkebunan plasma dengan cara menjalin kerja sama antara perusahaan dengan masyarakat yang telah lama menguasai lahan secara turun temurun. Dalam pola ini, pengerjaan seluruh plasma secara manajemennya diserahkan kepada masyarakat. Kemudian masyarakat membentuk suatu wadah untuk menaungi setiap kepentingan dari petani atau anggota plasma dalam bentuk koperasi. Koperasi yang dibentuk bekerja sama dengan perusahaan. Namun pada kenyataannya ternyata orang-orang yang ada di dalam tubuh atau menjadi pengurus koperasi tersebut adalah orang-orang dari perusahaan.

Pada saat ini anggota petani plasma yang ada di Desa Mandor Kiru berjumlah sebanyak dua ratus sembilan puluh tiga orang (293



orang) dengan jumlah lahan yang dimiliki oleh petani plasma yang ada di Desa Mandor Kiru tujuh puluh lima koma lima belas hektar (75,15 ha). Dari dua ratus sembilan puluh tiga jumlah anggota petani plasma, terbagi kedalam tujuh kelompok tani dan setiap kelompok tani memiliki jumlah anggota yang berbeda.

Yang menjadi dasar pemikiran perusahaan tersebut untuk membangun kebun yang ada di wilayah masyarakat dengan pola yang dibentuk adalah pola kemitraan dan membentuk kebun petani plasma adalah mengacu pada peraturan Menteri Nomor 26/Permentan/ar.140/2/2007 tentang pedoman perijinan usaha perkebunan pasal 11 yang berbunyi

“perusahaan wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan yang dilakukan antara lain melalui pola bagi hasil atau kredit dengan koperasi sebagai wadahnya”

Melalui pola yang diterapkan seperti ini, lahan yang sudah dimiliki lama oleh masyarakat, diserahkan kepada pihak perusahaan. Selanjutnya pihak perusahaan yang mengusahakan untuk mengelola hutan atau lahan milik masyarakat yang dari awalnya hutan menjadi perkebunan. Perusahaan membiayai semua yang diperlukan untuk membangun perkebunan dalam skala

yang cukup besar, mulai dari proses pembukaan lahan, pananaman bibit, pemanenan sampai pada semua proses perawatan perkebunan sebelum kebun diserahkan kepada masyarakat melalui koperasi yang telah dibentuk oleh masyarakat yang bekerja sama dengan perusahaan. Pembagaaian hasil tandan buah segar (TBS) dilakukan melalui koperasi dan diserahkan kepada anggota petani plasma sesuai dengan lahan atau jumlah lahan yang masyarakat miliki.

Dari hasil bersih yang diperoleh, kemudian dipotong sebesar 50% dari jumlah yang ada yang masuk ke perusahaan. Sisa dari potongan 50% tersebut menjadi bagian dari anggota petani plasma dan dibagikan kepada semua kelompok petani plasma yang ada sesuai dengan hasil TBS dari masing-masing kelompok petani plasma. Setelah dibagikan jumlah kelompok, masing-masing kelompok mendapatkan berapa dan dibagi lagi kepada masing-masing anggota. Itulah hasil dari kebun yang petani miliki.

Usaha yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik lagi melalui pola yang dibangun yaitu pola kemitraan bersama dengan masyarakat yang terkena dampak langsung dari pembangunan perkebunan dalam skala besar dinilai masih kurang efektif. Pembangunan yang dilakukan dengan tujuan yang

baik dan diatur dengan pola yang sedemikian rupa ternyata menimbulkan sejumlah masalah baru yang membuat masyarakat semakin merasa keberatan, masyarakat merasa kecewa.

Untuk proses pembayaran, koperasi bekerja sama dengan pihak Bank dalam pembayaran. Pada periode agustus sampai dengan september 2014 jumlah utang yang harus dibayar koperasi kepada pihak bank sebesar Rp. 1.775.037.490,-.

### **3. Konflik Antara Masyarakat Dengan Perusahaan.**

Masyarakat yang ada di Desa Mandor Kiru sebagian besar mengantungkan hidup mereka pada pekerjaan yaitu pertanian ladang dan pertanian perkebunan, seperti mengelola kebun karet secara mandiri atau pribadi. Pekerjaan ini sudah dilakukan masyarakat sejak lama, karena ini yang menjadi penopang kehidupan setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga. Baik kebutuhan untuk makan sehari-hari, sekolah anak-anak mereka sampai kebutuhan lainnya.

Sejak berdiri dari tahun 2006 sampai dengan sekarang, sudah terhitung kurang lebih 9 tahun perusahaan PT. Daya Landak Plantation (PT. DLP) ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat.

Lahan yang dimiliki atau menjadi hak usaha perusahaan untuk mengelolanya dalam bentuk perkebunan kelapa sawit mencapai 1741 ha. Lahan yang sangat luas ini meliputi beberapa daerah yang ada di Kecamatan Jelimpo. Salah satunya termasuk lah sebuah desa yang secara administratif masuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Jelimpo yaitu Desa Mandor Kiru.

Adanya perusahaan di lingkungan masyarakat, karena banyak dari masyarakat yang menyerahkan lahan kepada perusahaan, lahan yang awalnya mereka garap untuk berladang, kemudian diserahkan kepada perusahaan untuk dikelola menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Banyak dari orang-orang yang ada di kampung bekerja di perusahaan sebagai buruh harian. Beragam pekerjaan yang dapat dilakukan, seperti menanam bibit sawit, menanam kacang, nebas lapangan dan jenis pekerjaan lainnya. Sampai kepada proses perawatan sawit, semuanya dikerjakan oleh masyarakat yang bekerja sebagai buruh pada perusahaan. Segala pekerjaan berjalan dengan baik, tidak ada permasalahan yang dapat merugikan baik pihak perusahaan maupun pihak masyarakat. Setiap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan bekerja sebagai buruh pada perusahaan. Setiap bulannya pekerja dapat mengantongi uang gaji mereka

sekitar 1 juta sampai 1 juta lebih. Ini dapat mereka terima jika bekerja secara rutin setiap harinya. Karena sistem pengajiannya secara harian. Setelah berjalan beberapa lama, keadaan di perusahaan mulai mengalami perubahan. Kondisi yang awalnya dapat berjalan dengan baik, mulai muncul berbagai gejolak atau konflik, baik di lingkungan perusahaan maupun lingkungan masyarakat sendiri. Konflik bermula setelah sistem pekerjaan yang ada di lingkungan perusahaan berubah. Dari sistem pengerjaan pekerjaan dilapangan yang di bayar secara harian berubah menjadi sistem borongan. Ada banyak alasan yang menjadikan dalih pihak perusahaan untuk mengubah sistem yang ada, karena efektifitas kerja dan hasil kerja yang tidak memuaskan. Ini yang menjadi dasar diubahnya sistem kerja yang ada. Dengan berubahnya sistem kerja ini, banyak dari masyarakat yang tidak mau bekerja. Karena bekerja tidak mendapatkan hasil yang mencukupi, sehingga mengakibatkan banyak pekerjaan teknis dilapangan yang tidak terselesaikan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan berupaya untuk tetap memelihara perkebunan yang ada, dengan cara medatangkan pekerja atau buruh yang berasal dari luar daerah. Dengan datang nya pekerja atau buruh yang berasal dari luar saerah ini, masyarakat setempat protes. Sehingga mengakibatkan

pemulangan kembali pekerja yang berasal dari luar daerah tersebut.

Lahan yang dikerjakan oleh masyarakat tergolong dalam dua, yaitu ada lahan inti dan ada lahan plasma. Lahan plasma diserahkan perusahaan kepada pihak koperasi setelah sawit berumur 48 bulan (4 tahun). Pengelolaan baik secara teknis pekerjaan dan hasil dari setiap kebun yang ada menjadi tanggung jawab pengurus koperasi. pengurus koperasi bertanggung jawab dalah hal pemeliharaan kebun dan hasil kebun. Pendistribusian segala keperluan yang diperlukan petani untuk memelihara kebun menjadi tanggung jawab koperasi dan hasil dari kebun kemudian dikelola oleh koperasi dan bekerja sama dengan pihak perusahaan. Dengan adanya kebun yang dikelola oleh petani menjadi harapan oleh sekian banyak petani plasma, namun pada kenyataannya, Pada lahan plasma banyak sekali terjadi konflik dan kasus-kasus yang merugikan masyarakat. Ada beragam konflik yang terjadi pada petani plasma. Mulai dari kasus pencurian buah sawit, kasus pengelapan buah sawit, kasus pengancaman, pemanenan sepihak yang dilakukan oleh masyarakat petani plasma, kecemburuan sosial masyarakat kepada pihak perusahaan, penyegelan kantor atau fasilitas kantor oleh masyarakat. Ada banyak kasus yang terjadi yang bersingungan langsung antara masyarakat dan

perusahaan. Tercatat berdasarkan data yang di langsir oleh pihak polsek yang ada di Ngabang, kasus yang terjadi mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, sedikitnya ada 15 kasus yang masuk kedalam ranah hukum pidana. Pada kasus ini, pihak perusahaan seakan lepas tangan, dan pengelolaan kasus dilimpahkan kepada pihak koperasi, pengurus koperasi hanya dijadikan sebagai tameng perusahaan dalam menghadapi setiap permasalahan yang berhubungan dengan masyarakat atau anggota kelompok tani.

#### **4. Penyebab Terjadinya Konflik Dan Penanganan Yang Sudah Dilakukan.**

Dalam perusahaan PT. Daya Landak Plantation yang ada di Desa Mandor Kiru, banyak terjadinya konflik yang melibatkan unsur-unsur yang ada di dalamnya, seperti perusahaan dan masyarakat itu sendiri. Konflik tersebut seperti kasus pemanenan sepihak yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok tani yang ada di Desa Mandor Kiru terhadap lahan yang menjadi lahan plasma milik mereka. Para petani plasma yang ada melakukan pemanenan buah kelapa sawit secara bersama-sama di lahan milik mereka.

Konflik lain yang terjadi juga adalah adanya kasus penyegehan fasilitas milik perusahaan PT. Daya

Landak Plantation yang ada di Desa Mandor Kiru, seperti fasilitas kantor. Dengan adanya penyegehan seperti ini, secara kondisional sangat berdampak pada kegiatan yang ada di kantor untuk melakukan segala pekerjaan. Dengan itu dapat menimbulkan banyak kerugian. Yang memicu terjadinya penyegehan kantor yang dilakukan oleh masyarakat ini adalah karena masyarakat penyerah lahan atau petani plasma yang menyerahkan lahan mereka kepada perusahaan untuk di garap komplain mengenai penerimaan uang dana talangan hasil produksi kebun plasma yang dinilai sangat tidak memuaskan. Mengatasi hal tersebut, pihak perusahaan melaksanakan koordinasi dan mengadakan pembicaraan mengenai dana talangan yang digunakan. Koordinasi ini dilakukan dengan melibatkan perusahaan, muspika setempat dan pihak pemerintah secara khusus dibidangi oleh Disbunhut.

konflik lain juga yang terjadi sampai masuk ke dalam ranah hukum pidana adalah kasus pencurian. Kasus pencurian yang dimaksud adalah pencurian buah sawit yang dilakukan oleh beberapa oknum yang ada di masyarakat dan karyawan perusahaan itu sendiri.

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan juga adalah masalah penanganan jika ada pencuri atau maling buah yang tertangkap tangan mencuri. Untuk

menyelesaikan masalah ini sudah ada kesepakatan yang dibuat antara masyarakat adat dengan perusahaan PT. Daya Landak Plantation pada hari jumat, tanggal 4 april 2014. Hasil Kesepakatan itu sebagai berikut:

1. Adat tetap dibayar berdasarkan kesalahan
2. Mencuri buah kelapa sawit Rp. 200.000/tandan
3. Mencuri pupuk Rp. 15.000/Kg
4. Mencuri Herbisida Rp. 200.000/liter
5. Mencuri BBM Rp. 15.000/liter
6. Bagi karyawan kantor yang melakukan kesalahan yang sifatnya merugikan perusahaan, maka akan di PHK tanpa pesangon.
7. Bagi yang merusak aset perusahaan yang sifatnya merugikan perusahaan yang merugikan perusahaan akan dikenakan adat, berdasarkan kesalahannya dan kerugian perusahaan diganti.
8. Bagi yang melakukan pemagaran di lokasi kebun atau di jalan, akan dikenakan sanksi adat oleh pengurus adat setempat.

Ini merupakan keputusan yang dihasilkan berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan masyarakat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk kemudian menjadi acuan agar apa yang menjadi harapan

perusahaan maupun masyarakat mengenai kesejahteraan bersama dapat dicapai dengan baik. Namun pada kenyataannya berbeda. Masyarakat yang melakukan kesalahan dilingkungan perusahaan yang merugikan perusahaan langsung ditangani oleh pihak yang berwajib tanpa melalui proses hukum adat yang telah disepakati dibagian awal.

Dari hasil pertemuan tersebut, dilahirkan suatu kesepakatan yang kemudian akan dijalankan. Namun pada kenyataannya ada satu pihak yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat.

Konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan PT. Daya Landak Plantation ini merupakan karena adanya ketidakpuasan salah satu pihak akan kesepakatan atau pola yang telah disepakati. Namun terjadi perubahan-perubahan sehingga memicu terjadinya berbagai gejala-gejolak yang merugikan diri sendiri.

### **Analisis Konflik Pola Kemitraan Antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.**

Konflik menurut Killman dan Thomas (Wijono, 1933), merupakan kondisi ketidakcocokan nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai baik yang ada di dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Terjadinya konflik jika

antara kedua unsur yang ada dalam satu wadah menjalin kerjasama atau adanya hubungan yang mengikat antara satu sama lain. Kerja sama yang dibangun tentunya memiliki tujuan masing-masing antara kedua unsur tersebut. Seperti antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan mempunyai tujuan sendiri yang tercakup pada visi yang dimiliki perusahaan dan masyarakat juga memiliki tujuan tersendiri dalam menjaga keberlangsungan hidup dari setiap anggota keluarga.

Konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat yang ada di Desa Mandor Kiru karena antara perusahaan dan masyarakat memiliki hubungan yang erat berkenaan dengan hubungan produksi. Seperti teori yang dikemukakan oleh Karl Marx yaitu Teori Kelas. Dalam suatu masyarakat yang ada di Desa Mandor Kiru terciptanya kelas sosial yang memiliki tingkatan. Adanya kelas Borjuis dan adanya kelas proletar. Kelas borjuis adalah orang-orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dalam sistem perusahaan, sedangkan kelas proletar adalah golongan orang-orang yang hanya memiliki kemampuan untuk bekerja tetapi tidak memiliki kuasa. Jadi orang yang memiliki kekuasaan, menggunakan orang yang tidak memiliki kuasa untuk dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan secara pribadi.

Pola kemitaraan yang dibangun oleh perusahaan memiliki

tujuan yang mulia, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat yang memiliki hak penuh atas tanah yang mereka punya. Dengan pola ini tujuan natinya supaya antara perusahaan dan masyarakat sama-sama dapat menikmati dari hasil produksi yang diusahakan oleh perusahaan dan masyarakat. Namun pada kenyataannya apa yang menjadi harapan dan tujuan yang sudah dirancang, ternyata masih belum mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan secara bersama-sama. Dengan pola ini masih terdapat banyak masyarakat yang merasa kurang atau bahkan tidak merasa sejahtera. Masih banyak terdapat masyarakat yang awalnya berpihak pada perusahaan namun pada akhirnya malah berbalik menyerang perusahaan. Ini terjadi karena adanya pihak yang merasa tidak puas atau tidak sepeham dengan apa yang menjadi tolok ukur kesejahteraan. Orang-orang yang merasa tertekan akan melawan sampai mendapatkan apa yang mereka harapkan. Bentuk perlawanan yang terjadi sangat beragam, mulai dari bersuara melalui aksi massa, sampai melakukan berbagai tindakan yang dapat merugikan pihak yang dilawan maupun pihak yang melawan itu sendiri.

Masyarakat Desa Mandor Kiru mengalami perubahan. Banyak perubahan yang terjadi, baik dari alam dan juga manusianya. Alamnya

berubah wajah, dari hutan menjadi perkebunan yang menghasilkan atau produksi, manusianya juga mengalami perubahan yaitu pola pikir yang berubah. Perubahan yang terjadi ini tidak lepas dari kaitannya dengan perusahaan yang datang di Desa Mandor Kiru. Perubahan pola pikir manusia atau masyarakat yang ada di Desa Mandor Kiru ditandai dengan pertentangan atau gesekan-gesekan yang terus menerus terjadi yang menyebabkan konflik.

Konflik yang terjadi karena dalam masyarakat terdapat golongan-golongan atau kelompok yang memiliki perbedaan pandangan atau paradigma. Kelompok yang ada dalam masyarakat yaitu kelompok semu dan kelompok kepentingan. Pada kasus ini yang berada dalam kelompok semu itu adalah orang-orang yang ada di piha perusahaan, kelompok semu ini yaitu kelompok yang memiliki kuasa atau jabatan dengan kepentingan yang sama. Kepentingan kelompok ini adalah mengarah kepada hasil produksi dari perkebunan. Sedangkan kelompok kepentingan itu sendiri adalah masyarakat yang ada secara luas. Kelompok kepentingan ini lah yang nyata menjadi sumber timbulnya konflik yang terjadi. Konflik terjadi karena kelompok kepentingan yaitu masyarakat merasa apa yang menjadi hak mereka tetapi tidak diperhatikan oleh orang yang berada dalam kelompok semu, sehingga berontak dan terjadinya konflik.

Konflik dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan kepada siapa saja. Konflik tidak dapat dihilangkan selama manusia atau individu memiliki pikiran. Karena dari pikiran timbul ide-ide. Namun ide yang timbul dari setiap individu akan tidak sesuai dengan individu lainnya, sehingga memicu terjadinya pertentangan dan konflik. Konflik tidak dapat dihilangkan namun dapat dimanejemen dengan baik dan rapi. Ada beberapa keuntungan dari adanya konflik yang timbul. Menurut Berghe (George Ritzer, 1985),

1. Sebagai alat untuk memelihara solidaritas
2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain
3. Mengaktifkan peran individu yang semulanya terisolasi
4. Sebagai fungsi komunikasi. Semula sebelum terjadinya konflik, kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Tapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antar kelompok nampak jelas

Hal ini dapat terjadi jika konflik yang terjadi dapat dimanejemen dengan baik. Tidak semuanya konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena dengan adanya konflik, kita semakin mengetahui kekuatan atau karakter dari kelompok yang bertentangan dengan kelompok yang berada dipihak kita.

## PENUTUP

### Simpulan

Dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada BAB sebelumnya mengenai konflik yang terjadi antara perusahaan PT. Daya Landak Plantation (PT. DLP) dengan masyarakat yang ada di desa mandor kiru kecamatan jelimpo kabupaten landak disebabkan oleh banyak permasalahan atau penyebab yang memicunya.

1. Konflik atau permasalahan yang ada karena adanya rasa kekecewaan yang dialami oleh masyarakat terhadap perusahaan berkenaan dengan hasil dari lahan yang mereka telah serahkan kepada perusahaan untuk digarap menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk protes kepada perusahaan, seperti pemanenan buah sawit secara sepihak, pemblokiran akses untuk masuk menuju perkebunan, penutupan kantor, aksi pencurian buah sawit, perkelahian sampai kepengancaman.
2. Dengan aksi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, perusahaan juga melakukan reaksi dengan melibatkan pihak keamanan yang dalam hal ini pihak kepolisian untuk melakukan penjagaan baik disekitar kantor maupun kebun

sehingga semakin memicu ketegangan antara keduanya.

Terjadinya konflik yang melibatkan kedua unsur yang seharusnya saling mendukung tentunya mengakibatkan munculnya kerengangan keduanya. Adanya rasa saling curiga yang terjadi dan tidak adanya kedamaian dalam melakukan aktifitas pekerjaan. Selain muncul kerengangan, kerugian secara materi juga terjad. Kerugian ini dapat dirasakan baik perusahaan maupun masyarakat sendiri.

### Saran

Bagi pihak perusahaan dalam menangani permasalahan yang terjadi atau konflik yang terjadi di lingkungan perusahaan, ada baiknya melakukan pendekatan secara persuasif dengan masyarakat melalui komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dapat melibatkan pihak perusahaan atau orang yang ada di perusahaan untuk melakukan pendekatan dengan mendengar pendapat dari masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat secara periodik dan melakukan musyawarah sebelum terjadinya gejolak dalam masyarakat. Pekerjaan ini dapat melibatkan olah anggota Bina Mitra (BM). Agar gejolak yang akan terjadi diketahui oleh perusahaan dan diadakan penanganan sebelumnya.

Bagi pihak pemerintah sebagai fasilitator pembangunan



seharusnya memperhatikan kapentingan hak masyarakat atau rakyat. Sebagai wujud memperhatikan hak, pemerintah melakukan pengawalan serta pengawasan dengan mempertegas aturan-aturan yang mengatur tentang perijinan serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada masyarakat. Serta bersedia menjadi penengah ketika terjadinya permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Saran peneliti kepada masyarakat yang ada di Desa Mandor Kuru, bhawasanya dalam pengelolaan manajemen yang ada di perusahaan memerlukan para ahli yang memiliki sumber daya manusia yang mempuni serta memiliki pendidikan yang baik.oleh karena itu, dengan adanya perusahaan, masyarakat harusnya menahan diri untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Dan menjadikan perusahaan sebagai motivasi untuk mau terusa belajar dari hal-hal yang terjadi supaya sumber daya manusia dapat terus ditingkatan khususnya bagi anak-anak muda untuk pendidikannya terus diperhatikan agar tidak selalu dibodohi oleh orang luar, supaya kita dapat menjadi pemimpin di rumah sendiri.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal, Said. (2005). *Peran Pemerintah Dalam Pembangunan*. Jakarta: STIA LAIN
- Affandi, Hakimul Ikhwan. (2004). *Akar Konflik Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arkanudin. (2011). *Penelitian Antropologi Perubahan Sosial Masyarakat Peladang Berpindah*. Pontianak: Stain Pontianak Press
- Budiman, Arif. (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Hermansyah. (2010). Skripsi. *Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar (Studi di Desa Amboyo Inti Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak)*. Pontianak: Fisip Universitas Tanjungpura.
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muzakkir. (2004). Skripsi. *Pola Kemitraan Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit. (Studi Pada PT. Duta Palma Group di Kecamatan Sajingan Besar)*.

- Pontianak: Fisip Universitas Tanjungpura.
- Nugroho, Fera DKK. (2004). *Konflik Dan Kekerasan Pada Aras Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soehartono, I. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sulistiyani, ambar, teguh. (2004). *Kemtraan dan Model-Meodel Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sunarko. (2009). *Budidaya Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan*. Jakarta: PT. Agro Media Pustaka.
- Sunarto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dalam Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Susan, Novri. (2009). *Pengantar Osiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontenporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Trijono, Lambang.(2007). *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Wahyudi. (2006). *Manajemen Konflik Dalam Organisasi*. Bandung : Alfabeta
- Wijaya, Juhana. (2004). *Berbagai Konsep Tentang Masalah Sosial Budaya*. Bandung: Armico
- Wulansari, Dewi. (2009). *Sosiologi Konsep Dan Teori*. Bandung: PT Refika Aditama
- Zamroni. (1992). *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Ardianto. (2011). *Perekonomian Indonesia Saat Ini*. Retrieved 21 maret, 2014, from, <http://caturdj.wordpress.com/perekonomian-indonesia-saat-ini/>
- Arkanudin. (2013). *Sistem Perladangan Dan Kearifan Tradisional Orang Dayak Dalam Mengelola Sumber Daya Hutan*. Retrieved 03 Okober, 2014, from,

<http://aryosangpenggoda.blogspot.com/2013/05/sistem-perladangan-dan-kearifan.html>

BPS Kal-Bar. (2013). Potensi Kelapa Sawit di Kalimantan Barat. Retrieved 03 Oktober, 2014, from, <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/commodityarea.php?ia=61&ic=2>

Tempo. (2013). Ratusan Konflik Kelapa Sawit. Retrieved 03 Oktober, 2014, from, <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/21/058531439/Ada-Ratusan-Konflik-Sawit-di-Kalimantan-Barat>





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Uun Suwito  
NIM / Periode lulus : E51110001/III  
Tanggal Lulus : 18 Maret 2015  
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Sosiologi  
E-mail address/ HP : uun.suwito@yahoo.com

demu pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Sosiologigue\*) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

KONFLIK KEPENTINGAN APLIKASI POLA KEMITRAAN PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi di P.T Daya Landak Plantation, Desa Mandor Kiru, Kecamatan Jelimpo, kabupaten Landak)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *coment* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demiikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui, disetujui  
Pengelola Jurnal Sosiologigue

Viza Juliansyah, S.Sos, MA, MIR  
NIP. 198007142005011004

Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal : 18 Mei 2015

Uun Suwito  
NIM. E51110001

Catatan :

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(*Publika Governance Aspirasi Sociodev Sosiologigue*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)